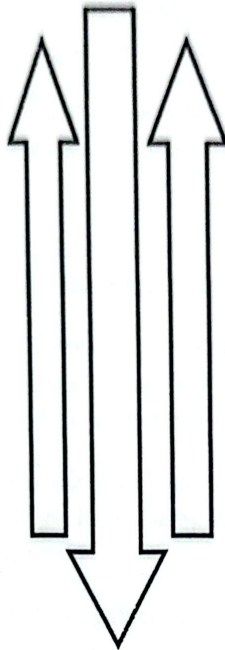




**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH DESA HALAKODANUAN
KECAMATAN ILE MANDIRI
KABUPATEN FLORES TIMUR**

2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan yang maha Esa dan Kuasa bahwa atas kasih dan Penyertaan sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2023 Kepada Bupati Flores Timur melalui Camat Ile Mandiri .

Salam dan selamat semoga sang Pencipta kehidupan dan leluhur Lewo Tana Halakodanuan selalu menyertai kita semua dalam segala Tugas dan Karya kita masing-masing.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2023 ini dibuat dan disampaikan kepada Bupati Flores Timur .

Sungguh merupakan sesuatu yang sangat berarti bagi kami, sehingga kami patut mengungkapkan rasa Terima kasih Yang Sangat mendalam khususnya Kepada ;

1. Bapak Bupati Flores Timur bersama jajarannya yang senantiasa melakukan Pendampingan, Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Bapak Camat Ile mandiri bersama jajarannya yang selalu mendorong dan membimbing terhadap jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Ketua BPD Halakodanuan bersama Anggotanya, Tokoh Masyarakat Desa Halakodanuan yang selalu bekerjasama dan mendukung Peunuh kegiatan Penyelenggaraan pemerintahan Desa di Tahun Anggaran 2023

Tentunya kami sangat menyadari, bahwa Laporan yang kami sampaikan ini masih banyak kekurangannya sehingga kami harapkan masukan dan kritikan untuk penyempurnaannya dari kita semua .

Demikian atas segala perhatiannya disampaikan terima kasih,

Halakodanuan, 30-03-2024

Kepala Desa Halakodanuan



BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Penyeleenggaraan Pemerintahan Desa, dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Hal tersebut ditandai dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dengan memberlakukan Undang-undangan yang mengatur mengenai pemerintah Desa.

Sejak di keluarkannya Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan yang terakhir yaitu undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa . Namun setidaknya dengan mulai dikeluarkannya Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat berusaha mengembalikan kewenangan kepada simbol - simbol asal usul Desa. Antara lain hal ini ditandai dari Penyerahan kembali kewenangan penyebutan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan sebutan yang berlaku bagi masing - masing Desanya pada masa lalu, seperti Kuwu (Kepala Desa), Juru Tulis (Sekretaris Desa) dan sebutan Perangkat Desa Lainnya.

Bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan pengganti Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, Desa atau sebutan nama lainnya yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas - batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan / atau dibentuk dalam system Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten. Ini berarti Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek kehidupan Desa baik dalam pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat . Disamping itu pengakuan terhadap kesatuan masyarakat Hukum berdasarkan hak asal - usul dan adat istiadat mengandung makna pemeliharaan terhadap hak - hak asli masyarakat Desa dengan landasan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat . Hal ini sebagaimana tercantum dalam undang -undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Kemudian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa ditegaskan sebagai berikut :

1. *Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak usul - usul Desa;*
2. *Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan Pengaturannya Kepada Desa*
3. *Tugas Pembantu dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ; dan*

4. *Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundang - undangan diserahkan Kepada Desa*

Tidak hanya itu saja , dari segi pendapatan Desa pun sebagaimana yang diatur dalam APBDES bagian pendapatan, di Permendagri No 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan keuangan Desa disebutkan bahwa : Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut terdiri atas :

1. *Pendapatan asli Desa*
2. *Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah Kabupaten / Kota*
3. *Bagian dari Dana Perimbang keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota*
4. *Bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota*
5. *Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga ;*

Perubahan yang cukup mendasar selain hal tersebut, bahwa Desa diberi kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan untuk membentuk "***Badan usaha Milik Desa***".

Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang menurut Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 pun diganti menjadi ***Badan Perwakilan Desa (BPD)*** menurut Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 dan yang terakhir menurut Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 berganti menjadi ***Badan Permusyawaratan Desa (BPD)***.

Selain itu, pengatur dan penetapan yang dilakukan oleh Desa, berubah bentuk dari ***Keputusan Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa menjadi Peraturan Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa***, bahkan yang terakhir menjadi ***Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa*** .

Penyelenggaraan Pemerintah Desa saat ini berdasarkan kepada Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa . Dalam masa akhir Pelaksanaan Pemerintahan Desa, setiap Tahun wajib menyampaikan Laporan Kepada Bupati melalui Camat .

" ***Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*** " ini sebagai bentuk pelaporan Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa .

B. VISI dan MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

a. VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa . Penyusunan Visi Desa Halakodanuan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak - pihak yang

berkepentingan di Desa Halakodanuan seperti Pemerintah Desa, BPD, Toko masyarakat Toko Agama, Lembaga Masyarakat Desa pada umumnya. Visi Desa Halakodanuan "*Terwujudnya Desa Halakodanuan Yang Mandiri dalam semangat Gotong royong, Kejujuran, Keadilan, menuju Desa Yang Bersih, Elok, Nyaman, Aman, Menarik, Indah dan Sejahtera* ." melalui visi ini diharapkan masyarakat ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang inginkan dicapai, dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan - perubahan yang akan terjadi. Mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik menumbuhkan kompetensi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

b. MISI

Misi merupakan turunan / penjabaran diri visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha - usaha mencapai visi desa selama masa jabatan Kepala Desa untuk merai desa seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan aspek masalah dan potensi yang ada di Desa yang berdasarkan potret Desa, kalender musim dan kelembagaan Desa maka disusunlah misi Desa sebagai berikut :

1. Menanamkan dengan menumbuhkan semangat kemandirian dalam pelbagai Bidang kehidupan masyarakat Desa Halakodanuan untuk menggali potensi baik pada diri pribadi maupun dalam kesatuan sebagai Lewo atau Masyarakat
2. Melestarikan dan mengembangkan kearifan dan nilai - nilai tradisi yang menyokong tegaknya semangat gemohing atau gotong royongan untuk mempercepat gerak pembangunan ;
3. Mendorong terbentuknya Pemerintah Desa yang berwibawa, jujur, dan profesional dengan mengedepankan asas keteladanan dari pucuk pimpinan sampai pada jajaran terendah dan menciptakan kondisi kerja yang kondusif sehingga Aparat Pemerintah Desa dapat bekerja dengan semangat, jujur dan aktif ;
4. Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pelayanan pemerintah yang tidak saja efektif (berhasil guna) tapi juga efisien (hemat biaya, tenaga, dan waktu dengan menerapkan / menggunakan teknologi informasi khususnya dalam pengurusan administrasi kependudukan masyarakat Desa Halakodanuan sebagai syarat penting dalam mengakses layanan publik pendidikan , Kesehatan dan lain - lain ;

5. Menerapkan dan mngedepankan musyawarah mufakat yang dilandasi KEJUJURAN, dan KEADILAN sebagai perwujudan hak - hak masyarakat dalam partisipasi penyelenggaraan roda pemerintah, pelaksanaan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat ;
6. Mengadakan dan meningkatkan sarana dan prasarana Desa
7. Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa
8. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat samapai pada taraf yang optimal dengan mengkover masyarakat yang kurang mampu dalam kepesertaan BPJS bersubsidi / penerima Bantuan ;
9. Memelihara dan meningkatkan keharmonisan hidup beragama dan berbudaya

C. STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN DESA

Program DD (Dana Desa) yang dilaksanakan pada Tahun 2023 permula baru bagi Desa dalam menjalankan ataupun mendukung dalam upaya belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemeberdayaan masyarakat .sebelum dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa terlebih dahulu, yang akan menghasilkan beberapa jenis kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Desa dari dana APBDDesa maupun Pemerintah Kabupaten dari APBD Kabupaten, Pemerintah Provinsi dari Propinsi dan Pemerintah Pusat dari dana APBN. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Menghasilkan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Merupakan perencanaan penting untuk kegiatan strategis Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 6 (Enam) Tahun kedepan yang mengacu pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDDesa. Prioritas pembanguan Jangka Menengah Desa periode Tahun (Tahun awal) samapai dengan (Tahun akhir) meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Penanggulangan Bencana.
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan Rencana kerja Penyelenggaraan Pemerintah desa yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek atau bersifat Tahunan yang kegiatannya berdasarkan APBDDesa yang telah disetujui bersama BPD dan untuk dikerjakan pada tahun anggaran yang didanai oleh Desa dengan sumber Pendapatan pada :

- ❖ DD
- ❖ PAD
- ❖ ADD
- ❖ BPH Kabupaten

Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kegiatan tiap Tahun.

D. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan Desa, didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten .
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa didanai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang. Kemudian keuangan merupakan bagian merupakan bagian dari proses **MURENBANGDES**. Kebijakan Pemerintah Desa dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan Desa yang ada dengan Pendapatan Asli Desa (PAD) Jumlah PAD Desa tiap tahunnya dalam kisaran rata - rata Rp 0,00 (Nol). Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa masih banyak kekurangan dan masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam hal Anggaran ADD. Untuk itu Pemerintah Desa mengharapkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten terus diperbesar guna menyelesaikan beberapa kegiatan Pembangunan - Pembangunan fisik maupun non fisik.

E. ALOKASI DANA REALISASI ANGGARAN

1. PENDAPATAN

Penadapatan Desa selama ini menjadi modal utama dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 yang tertuang didalam Dokumen APBDesa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Pendapatan Asli Desa | : Rp 0,00 |
| a. Hasil usaha Desa | : Rp 0,00 |

b. Hasil aset Desa	: Rp 0,00
2. Pendapatan Transfer	: Rp 998.716.467,00
a. Alokasi Dana Desa (ADD)	: Rp 322.890.640,00
b. Dana Desa (DD)	: Rp 660.330.000,00
c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP)	: Rp 5.495.827,00
3. Lain - lain Pendapatan Desa yang sah	: Rp 1.064.530,00
a. Bunga bank	: Rp 1.064.530,00
JUMLAH PENDAPATAN	: Rp 989.780.997,00

2. PENGELOLAAN BELANJA DESA

Pendapatan Desa dalam Satu Tahun Anggaran dialokasikan kedalam Belanja Desa dengan komposisi sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	: Rp 387.753.640,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp 345.607.482,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp 13.235.000,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Rp 206.637.892,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	: Rp 170.535.000,00

3. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN

Dalam struktur APBDesa terdapat Pembiayaan yaitu Semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun Anggaran berjalan maupun pada Tahun berikutnya dengan komposisi sebagai berikut

1. Penerimaan Pembiayaan	: Rp 133.988.017,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp 133.988.017,00

F. PELAKSANAAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PTPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa mencakup Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Penanggulan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa yaitu :

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PTPKD
1	Agustinus Pulo Piran	Sekretaris Desa	Koordinator
2	Maria Goreti Pal Weking	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
3	Sprianus Talu Tukan	Kepala Seksi Pembangunan	Pelaksana Kegiatan
4	Rofita Theresia Nogo Lebuan	Kepala Seksi Pemberdayaan	Pelaksana Kegiatan

BAB II

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

A. RENCANA DAN PELAKSANA PROGRAM KERJA BIDANG PEMERINTAH DESA

1. Proses Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Proses perencanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dikedepankan Pemerintah Desa adalah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (**MUSRENBANGDES**) yang dilaksanakan oleh BPD tiap tahun dengan menghadirkan Lembaga – lembaga Desa dan tokoh masyarakat yang peduli Desa. Dengan menghasilkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa mencakup :

- ❖ Penghasilan Tetap dan Tunjang Kepala Desa
- ❖ Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- ❖ Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- ❖ Tunjangan Tetap BPD
- ❖ Penyediaan Operasional BPD
- ❖ Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa
- ❖ Penyusunan, Pendataan dan Pemutakiran Data Profil
- ❖ Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan keuangan dan Pelaporan yang meliputi kegiatan :
- *Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdes,Rembug Desa)*
- *Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa,RKPDesa,dll)*
- *Penyusunan Laporan Kepala Desa (LPPDesa dan informasi kepada masyarakat.*

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang mencakup :

- ❖ Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TKA/TPQ/Madarasa Nonformal
- ❖ Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
- ❖ Dukungan Pendidikan Bagi siswa miskin berprestasi
- ❖ Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (Insentif kesehatan Desa, Obat-obatan)
- ❖ Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, stunting, Insentif kader Posyandu.
- ❖ Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Sarana Posyandu/Polindes/PKD
- ❖ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana jalan Desa
- ❖ Dukungan Pelaksanaan Program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
- ❖ Pengadaan Baliho APBDesa Tahun 2023

3. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa yang Mencakupi :

- ❖ Penguatan/Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Desa oleh Pemerintah Desa
- ❖ Pembinaan Lembaga Adat
- ❖ Pembinaan Lembaga LKMD/LPM/PMD
- ❖ :Pembinaan PKK

4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa yang Mencakupi :

- ❖ Peningkatan Produksi Tanaman pangan
- ❖ Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

5. Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa yang Mencakupi :

- ❖ Penanganan Covid 19
- ❖ Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2023

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala seksi Pemerintahan, Pelaksana kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa oleh Kepala Seksi Pembangunan Serta Pelaksanaan Pembinaan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan selaku Pelaksana Teknis PTPKD. Cakupan Bidang Pelaksananya adalah Kegiatan disemua Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan Anggaran yang telah tertuang dalam APBDesa Tahun 2023

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023

Peraturan Desa Halakodanuan Nomor 6 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 diundangkan Pada Tanggal 28 Desember 2022. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD)

B. PERATURAN DESA TENTANG REALISASI PERTANGGUNG JAWABAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAAN 2023

Peraturan Desa Halakodanuan Nomor 1 Tentang Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, diundangkan pada Tanggal 28 Desember 2022. Peraturan Desa Tentang Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD)

BAB IV

TINGKAT PENCAPAIAN

Tingkat pencapaian maksimal target / sasaran yang diharapkan sebagai wujud dari tercapainya Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2023, dengan prosentasi serapan anggaran 100% yaitu di bidang :

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Pemberdayaan masyarakat Desa, dan
5. Penanggulangan Bencana dan Keadaan Mendesak Desa

Dari Tahun ke Tahun Target Pendapatan Asli Desa mengalami kondisi kenaikan berkala sebagai upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan diseluruh wilayah. Permasalahan yang di hadapi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2023 adalah :

❖ ***Pendataan data Profil Desa***

Penyelesaian Masalah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yaitu : menghadirkan para ketua - ketua Rt, bersama dengan kepala -kepala Dusun untuk diberikan pemahaman dan pembekalan sesuai petunjuk teknis pendataan yang akan diterapkan dan sistem aplikasi Permendeskel. Secara terpusat.

❖ ***Pelaksanaan Pembangunan Desa***

Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa : menghadirkan seluruh koponen yang terkait di Desa serta seluruh masyarakat Desa untuk diberikan pemahaman dan sosialisasi rencana kegiatan serta maksud dan tujuan dari kegiatan ini untuk di ketahui oleh seluruh masyarakat Desa.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 yang dapat kami sampaikan. Sehubungan hal tersebut dalam Rangka mempelancar pengelolaan agenda Visi dan Misi Desa, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain :

- ❖ Mengidentifikasi semua kegiatan atau usulan dari masyarakat sesuai dengan jenis kegiatan dan sesuai dengan pagu Anggaran dalam satu Tahun Anggaran yang berjalan
- ❖ Mengakomodir kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang di rasakan oleh masyarakat Desa umumnya.

Berbagai upaya terobosan yang progresif, kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat akan terus dilakukan secara berkesinambungan. Selain hal tersebut kerjasama yang baik dan intens antara Pemerintah Desa dengan seluruh stakeholders akan selalu kami kedepankan untuk menghindari distorsi informasi yang berdampak pada penafsiran yang berbeda dalam menyelesaikan agenda Pembangunan Desa yang telah diamanahkan.

KEPALA DESA HALAKODANUAN



GABRIEL PATI TUKAN

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK PADA AKHIR TAHUN 2023

Penduduk Desa Halakodanuan secara keseluruhan menyebar di ketiga wiyah dusun dengan jumlah Total sebgai berikut : 521 jiwa

JUMLAH PENDUDUK MASING- MASING DUSUN

❖ DUSUN 1 (BUAN BELE)

LAKI-LAKI	: 58
PEREMPUAN	: 84
Jumlah	: 142
Jumlah KK	: 43
• KK Laki-laki	: 33
• KK Perempuan	: 10
Jumlah Jiwa	: 142
• Laki - laki	: 58
• Perempuan	: 84

PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

• Petani	: 65
• Nelayan	: 1
• Guru	: 1
• wiraswasta	: 2
• karywan swasta	: 2
• Pelajar	: 32
• Belum / Tidak	: 35
• Perangkat Desa	: 4

PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

• TK	: 4
• SD	: 80
• SMP	: 16
• SMA	: 27
• S1	: 4
• Belum/tdak	: 11

❖ DUSUN 2 (ROBUN DIKE)

LAKI-LAKI	: 109
PEREMPUAN	: 98
Jumlah KK	: 53
• KK Laki-laki	: 42
• KK Perempuan	: 11
Jumlah Jiwa	: 199
• Laki - laki	: 101
• Perempuan	: 98

PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

• Petani	: 74
• Nelayan	: -
• Guru	: 3
• Wirasawasta	: -
• Karyawan swasta	: 22
• Pelajar	: 44
• Perangkat Desa	: 4
• Belum / tidak	: 52

PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

• TK	:
• SD	: 101
• SMP	: 22
• SMA	: 5
• S1	:
• Belum /Tidak	:

❖ DUSUN 3 (GAWAK SARE)

LAKI-LAKI	: 90
PEREMPUAN	: 87
Jumlah KK	: 45
• KK Laki-laki	: 36
• KK Perempuan	: 10
Jumlah Jiwa	: 177
• Laki - laki	: 90
• Perempuan	: 87

PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

• Petani	: 58
• Nelayan	: 2
• Guru	: 6
• Wirasawasta	: 3
• Karyawan swasta	: 19
• Pelajar	: 54
• Belum /tidak	: 25
• Pensiunan	: 2
• Perawat	: 1
• TNI / POLRI	: 1
• Perangkat Desa	: 3

PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

• TK	: 6
• SD	: 95
• SMP	: 28
• SMA	: 31
• D3	: 2
• S1	: 10
• Belum / Tidak	: 5

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA HALAKODANUAN
KECAMATAN ILE MANDIRI
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		988.716.467,00	988.888.587,00	1.847.880,00
Dana Desa		660.330.000,00	660.330.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		5.495.827,00	5.495.827,00	0,00
Alokasi Dana Desa		322.890.640,00	321.042.760,00	1.847.880,00
Pendapatan Lain-lain		1.064.530,00	1.064.530,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		989.780.997,00	987.933.117,00	1.847.880,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		387.753.640,00	380.771.760,00	6.981.880,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		345.607.482,00	340.305.292,89	5.302.189,11
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		13.235.000,00	7.235.000,00	6.000.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		206.637.892,00	112.265.085,00	94.372.807,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		170.535.000,00	163.375.000,00	7.160.000,00
JUMLAH BELANJA		1.123.769.014,00	1.003.952.137,89	119.816.876,11
SURPLUS / (DEFISIT)		(133.988.017,00)	(16.019.020,89)	(117.968.996,11)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		133.988.017,00	0,00	133.988.017,00
PEMBIAYAAN NETTC		133.988.017,00	0,00	133.988.017,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	(16.019.020,89)	16.019.020,89

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA HALAKODANUAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	988.716.467,00	988.868.687,00	1.847.880,00
4.2.1.	Dana Desa	660.330.000,00	660.330.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	5.495.827,00	5.495.827,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	322.890.640,00	321.042.760,00	1.847.880,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.064.530,00	1.064.530,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	1.064.530,00	1.064.530,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	989.780.997,00	987.933.117,00	1.847.880,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	312.381.600,00	310.749.720,00	1.631.880,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	244.581.600,00	242.949.720,00	1.631.880,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	437.363.709,76	334.530.639,00	102.833.070,76
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	153.826.487,00	109.149.330,00	44.677.157,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	144.805.000,00	138.805.000,00	6.000.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	55.614.530,00	19.314.530,00	36.300.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	62.347.692,76	46.491.779,00	15.855.913,76
5.3.	Belanja Modal	203.488.704,24	195.296.778,89	8.191.925,35
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ala	72.004.060,00	63.815.085,00	8.188.975,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	74.284.644,24	74.281.693,89	2.950,35
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	170.535.000,00	163.375.000,00	7.160.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	170.535.000,00	163.375.000,00	7.160.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.123.769.014,00	1.003.952.137,89	119.816.876,11
	SURPLUS / (DEFISIT)	(133.988.017,00)	(16.019.020,89)	(117.968.996,11)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	133.988.017,00	0,00	133.988.017,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	133.988.017,00	0,00	133.988.017,00
	PEMBIAYAAN NETTC	133.988.017,00	0,00	133.988.017,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	(16.019.020,89)	16.019.020,89



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA HALAKODANUAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.2.	Pendapatan Transfer	988.716.467,00	988.868.667,00	1.847.880,00
	4.2.1.	Dana Desa	660.330.000,00	660.330.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	660.330.000,00	660.330.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	5.495.827,00	5.495.827,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	5.495.827,00	5.495.827,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	322.890.640,00	321.042.760,00	1.847.880,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	322.890.640,00	321.042.760,00	1.847.880,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.064.530,00	1.064.530,00	0,00
	4.3.6.	Bunga Bank	1.064.530,00	1.064.530,00	0,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	1.064.530,00	1.064.530,00	0,00
		JUMLAH PENDAPATAN	989.780.997,00	987.933.117,00	1.847.880,00
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	387.753.640,00	380.771.760,00	6.981.880,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	346.125.897,00	340.494.017,00	5.631.880,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	244.581.600,00	242.949.720,00	1.631.880,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	244.581.600,00	242.949.720,00	1.631.880,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	244.581.600,00	242.949.720,00	1.631.880,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	244.581.600,00	242.949.720,00	1.631.880,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12.201.673,00	12.201.673,00	0,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.201.673,00	12.201.673,00	0,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.587.143,00	11.587.143,00	0,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.148.143,00	3.148.143,00	0,00
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	450.000,00	450.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	949.000,00	949.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.240.000,00	4.240.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	614.530,00	614.530,00	0,00
1.1.4	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	614.530,00	614.530,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.732.724,00	1.732.724,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.732.724,00	1.732.724,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.032.724,00	1.032.724,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	167.724,00	167.724,00	0,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	115.000,00	115.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	750.000,00	750.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	700.000,00	700.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	700.000,00	700.000,00	0,00
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	19.809.900,00	15.809.900,00	4.000.000,00
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.809.900,00	15.809.900,00	4.000.000,00
1.1.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.809.900,00	4.809.900,00	0,00
1.1.8	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	4.809.900,00	4.809.900,00	0,00
1.1.8	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
1.1.8	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
1.1.8	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.1.8	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.3		<u>Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,</u>	<u>14.929.743,00</u>	<u>14.929.743,00</u>	<u>0,00</u>
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	14.929.743,00	14.929.743,00	0,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.929.743,00	14.929.743,00	0,00
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.879.743,00	1.879.743,00	0,00
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	248.743,00	248.743,00	0,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	191.000,00	191.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00
1.3.2	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
1.3.2	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
1.4		<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,</u>	<u>26.698.000,00</u>	<u>25.348.000,00</u>	<u>1.350.000,00</u>
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.215.000,00	2.865.000,00	1.350.000,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.215.000,00	2.865.000,00	1.350.000,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.215.000,00	2.865.000,00	1.350.000,00
1.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	315.000,00	315.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.2	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.900.000,00	2.550.000,00	1.350.000,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	20.283.000,00	20.283.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.283.000,00	20.283.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.883.000,00	11.883.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.138.000,00	3.138.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.585.000,00	2.585.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
1.4.7		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
1.4.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	175.000,00	175.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	345.607.482,00	340.305.292,89	5.302.189,11
2.1		Sub Bidang Pendidikan	70.963.520,00	65.932.099,00	5.031.421,00
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	38.469.460,00	38.469.460,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.469.460,00	38.469.460,00	0,00
2.1.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.409.460,00	2.409.460,00	0,00
2.1.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.311.460,00	1.311.460,00	0,00
2.1.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	758.000,00	758.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	340.000,00	340.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.1.1	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.1.1	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
2.1.1	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	660.000,00	660.000,00	0,00
2.1.1	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	600.000,00	600.000,00	0,00
2.1.2		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	15.354.060,00	15.354.060,00	0,00
2.1.2	5.3.	Belanja Modal	15.354.060,00	15.354.060,00	0,00
2.1.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	15.354.060,00	15.354.060,00	0,00
2.1.2	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	15.354.060,00	15.354.060,00	0,00
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	17.140.000,00	12.108.579,00	5.031.421,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.140.000,00	12.108.579,00	5.031.421,00
2.1.10	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepi	17.140.000,00	12.108.579,00	5.031.421,00
2.1.10	5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	17.140.000,00	12.108.579,00	5.031.421,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	185.443.962,00	185.173.193,89	270.768,11
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	47.155.000,00	47.155.000,00	0,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.155.000,00	43.155.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.955.000,00	2.955.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	925.000,00	925.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	480.000,00	480.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00
2.2.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.2.1	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.2.1	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.2.1	5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	62.629.500,00	62.629.500,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.479.500,00	58.479.500,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	24.269.500,00	24.269.500,00	0,00
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	207.500,00	207.500,00	0,00
2.2.2	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	40.000,00	40.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabur	500.000,00	500.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	23.372.000,00	23.372.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00
2.2.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
2.2.2	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
2.2.2	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	60.000,00	60.000,00	0,00
2.2.2	5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	60.000,00	60.000,00	0,00
2.2.2	5.3.	Belanja Modal	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00
2.2.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00
2.2.2	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.2.2	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris I	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.2.2	5.3.2.05.	Belanja Modal Peralatan Dapur	150.000,00	150.000,00	0,00
2.2.9		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengada an Sarana/Prasarana	75.659.462,00	75.388.693,89	270.768,11

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.9	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.374.817,76	1.107.000,00	267.817,76
2.2.9	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	1.374.817,76	1.107.000,00	267.817,76
2.2.9	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ki	1.374.817,76	1.107.000,00	267.817,76
2.2.9	5.3.	Belanja Modal	74.284.644,24	74.281.693,89	2.950,35
2.2.9	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	74.284.644,24	74.281.693,89	2.950,35
2.2.9	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	2.089.000,00	2.089.000,00	0,00
2.2.9	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upat	20.257.204,89	20.257.204,89	0,00
2.2.9	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahe	51.938.439,35	51.935.489,00	2.950,35
2.4		<u>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</u>	<u>87.200.000,00</u>	<u>87.200.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ki	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.4.5		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00
2.4.5	5.3.	Belanja Modal	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00
2.4.5	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00
2.4.5	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00
2.6		<u>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>13.235.000,00</u>	<u>7.235.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>
3.1		<u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan</u>	<u>4.200.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>
3.1.2		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4.200.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00
3.1.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00
3.1.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.200.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00
3.1.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	4.200.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00
3.4		<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>9.035.000,00</u>	<u>4.235.000,00</u>	<u>4.800.000,00</u>
3.4.1		Pembinaan Lembaga Adat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
3.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
3.4.3		Pembinaan PKK	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00
3.4.3	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	185.000,00	185.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	185.000,00	185.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	208.837.892,00	112.265.085,00	94.372.807,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	164.432.875,00	70.060.068,00	94.372.807,00
4.2.1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	112.832.875,00	25.610.464,00	87.222.411,00
4.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.832.875,00	21.976.200,00	84.856.675,00
4.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00
4.2.1	5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00
4.2.1	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	55.000.000,00	18.700.000,00	36.300.000,00
4.2.1	5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	55.000.000,00	18.700.000,00	36.300.000,00
4.2.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	9.832.875,00	3.276.200,00	6.556.675,00
4.2.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4.2.1	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	6.832.875,00	3.276.200,00	3.556.675,00
4.2.1	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	3.634.264,00	2.365.736,00
4.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	6.000.000,00	3.634.264,00	2.365.736,00
4.2.1	5.3.2.09.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan	6.000.000,00	3.634.264,00	2.365.736,00
4.2.2		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	51.600.000,00	44.449.604,00	7.150.396,00
4.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.100.000,00	30.772.843,00	1.327.157,00
4.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	32.100.000,00	30.772.843,00	1.327.157,00
4.2.2	5.2.1.11.	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan	32.100.000,00	30.772.843,00	1.327.157,00
4.2.2	5.3.	Belanja Modal	19.500.000,00	13.676.761,00	5.823.239,00
4.2.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	19.500.000,00	13.676.761,00	5.823.239,00
4.2.2	5.3.2.09.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan	19.500.000,00	13.676.761,00	5.823.239,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.039.017,00	10.039.017,00	0,00
4.3.2		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.039.017,00	10.039.017,00	0,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.039.017,00	10.039.017,00	0,00
4.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.514.017,00	3.514.017,00	0,00
4.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.827.017,00	1.827.017,00	0,00
4.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	127.000,00	127.000,00	0,00
4.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00
4.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00
4.3.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kor	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.4		<u>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,</u>	<u>9.166.000,00</u>	<u>9.166.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.4.1		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	9.166.000,00	9.166.000,00	0,00
4.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.166.000,00	9.166.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	3.786.000,00	3.786.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	202.500,00	202.500,00	0,00
4.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	169.000,00	169.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	1.654.500,00	1.654.500,00	0,00
4.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kor	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00
4.5		<u>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan</u>	<u>23.000.000,00</u>	<u>23.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.5.3		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
4.5.3	5.3.	Belanja Modal	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
4.5.3	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
4.5.3	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	170.535.000,00	163.375.000,00	7.160.000,00
5.2		<u>Sub Bidang Keadaan Darurat</u>	<u>8.535.000,00</u>	<u>1.375.000,00</u>	<u>7.160.000,00</u>
5.2.0		Penanganan Keadaan Darurat	8.535.000,00	1.375.000,00	7.160.000,00
5.2.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.535.000,00	1.375.000,00	7.160.000,00
5.2.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	8.535.000,00	1.375.000,00	7.160.000,00
5.2.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	8.535.000,00	1.375.000,00	7.160.000,00
5.3		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>162.000.000,00</u>	<u>162.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			1.123.769.014,00	1.003.952.137,89	119.816.876,11
SURPLUS / (DEFISIT)			(133.988.017,00)	(16.019.020,89)	(117.968.996,11)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	133.988.017,00	0,00	133.988.017,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	133.988.017,00	0,00	133.988.017,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	133.988.017,00	0,00	133.988.017,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			133.988.017,00	0,00	133.988.017,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	(16.019.020,89)	16.019.020,89

HALAKODANUAN, 30 April 2024

KEPALA DESA



GABRIEL PATITUKAN

LAMPIRAN
PERATURAN DESA HALAKODANUAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA HALAKODANUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	988.716.467,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.064.530,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	989.780.997,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	312.381.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	437.363.709,76	
5.3.	Belanja Modal	203.488.704,24	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	170.535.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.123.769.014,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(133.988.017,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	133.988.017,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	133.988.017,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	133.988.017,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

HALAKODANUAN, 27 December 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA HALAKODANUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	988.716.467,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.064.530,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	989.780.997,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	387.753.640,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	346.125.897,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	244.581.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	244.581.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12.201.673,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.201.673,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat. ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.732.724,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.732.724,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	19.809.900,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.809.900,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.929.743,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	14.929.743,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.929.743,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	26.698.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.215.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.215.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	20.283.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.283.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.200.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	346.607.482,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	70.963.620,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaiat dll)	38.469.460,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.469.460,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	15.354.060,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	15.354.060,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	17.140.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.140.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	185.443.962,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	47.155.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.155.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	62.629.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.479.500,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	4.150.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	75.659.462,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.374.817,76	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	74.284.644,24	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	87.200.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	57.200.000,00	DDS
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	57.200.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	13.235.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.200.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4.200.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.035.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	3.000.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.800.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1.235.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.235.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	206.637.892,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	164.432.875,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	112.832.875,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.832.875,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	51.600.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.100.000,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	19.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.039.017,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.039.017,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.039.017,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.166.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	9.166.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.166.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	23.000.000,00	
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	23.000.000,00	DDS
4.5.03	5.3.	Belanja Modal	23.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	170.535.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	8.535.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	8.535.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.535.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	162.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.123.769.014,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(133.988.017,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	133.988.017,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	133.988.017,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

HALAKODANUAN, 27 December 2022

KEPALA DESA



GABRIEL WATI TUKAN